

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIKALONG
TAHUN 2021-2026**

Alamat : Jln. Raya Cikalong Nomor 100 Kode Pos 46195 Cikalong
e-mail : cikalong@tasikmalayakab.go.id Tasikmalaya 46195

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Cikalong dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.



MISLU AHMAD MAHMUDIN, S.IP
Pembina
NIP. 19650818 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC. CIKALONG	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEC. CIKALONG...	10
2.2. SUMBER DAYA KEC. CIKALONG	18
2.3. KINERJA PELAYANAN KEC. CIKALONG	19
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC. CIKALONG	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. CIKALONG	25
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	26
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	29
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	29
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

- Tabel T-C 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel T-C 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel T-B.35 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- Tabel T-C 2.5 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel T-C.26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 6.1 (T-C.27) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 7.1 (T-C.28) INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cikalong	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Cikalong Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

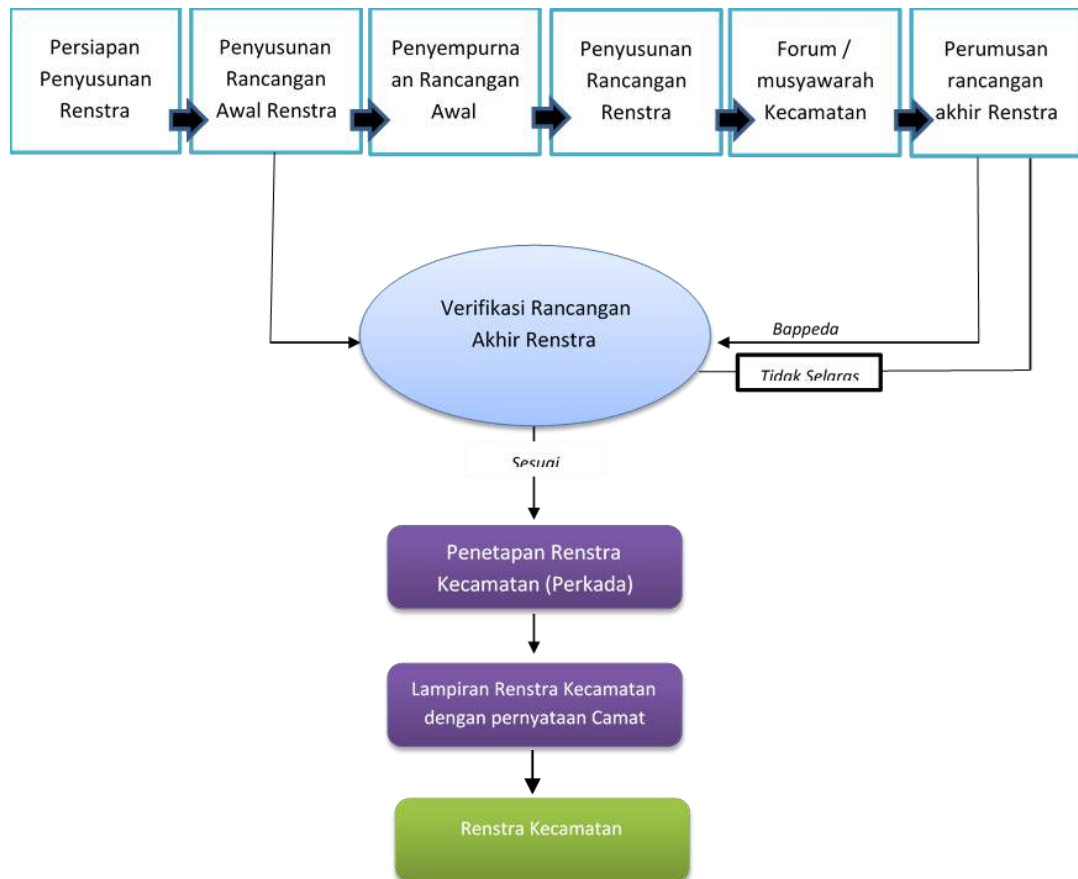
dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Cikalong dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Cikalong untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
3. Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Cikalong

Proses penyusunan Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Cikalong di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kab. Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kec. Cikalong

4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Cikalong; sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Cikalong, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kec. Cikalong

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Cikalong; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kab. Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Cikalong Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Cicalong selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indicator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Cicalong, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya.

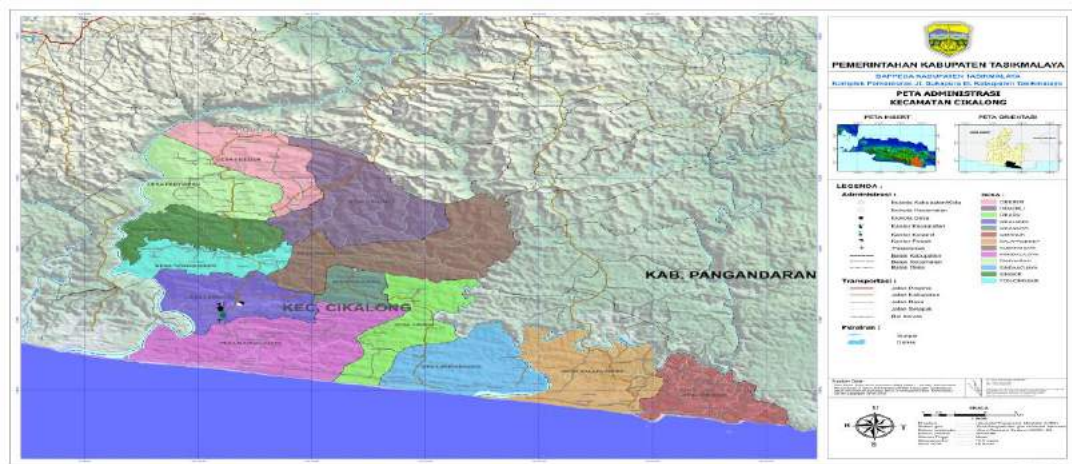
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Cikalong, adalah :

Secara geografis Kecamatan Cikalong terletak antara 107,00 – 107,30 BT dan 5,00 – 6,30 LS, terletak dibagian selatan Kota Tasikmalaya dengan jarak \pm 80 Km , Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Pancatengah
 - Sebelah Timur : Kabupten Pangandaran
 - Sebelah Selatan : Samudra Hindia
 - Sebelah Barat : Kec. Cipatujah
- a. Luas Wilayah : 132,91 Km²
 - b. Penduduk : 66.023 Jiwa
 - Laki -laki : 33.079 Jiwa
 - Perempuan : 32.944 Jiwa
 - c. Desa : 13 Desa
 - d. Kepunduhan : 82 Dusun
 - e. RT : 317 RT
 - f. RW : 90 RW

Gambar 1
Peta Kec. Cikalong



Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Cikalong Dari aspek demografi penduduk Kec. Cikalong berjumlah 66.023 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 33.079 jiwa dan Perempuan berjumlah 32.944

jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Cikalong terdiri dari Taman Kanak-Kanak 84 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 56 SMP/Sederajat sebanyak 23, SMA/Sederajat sebanyak 11 Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Cikalong terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 7 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Cikalong Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 1 buah, Pasar desa sebanyak 5 buah, Pasar tradisional sebanyak 1 buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Cikalong, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kab. Tasikmalaya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Cikalong

Kec. Cikalong, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec. Cikalong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Struktur organisasi Kec. Cikalong berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - d. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;

- m. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
 - g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup

kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan,

- pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - r. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - t. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - u. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - v. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - w. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- g. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
 - f. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;

- l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- n. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

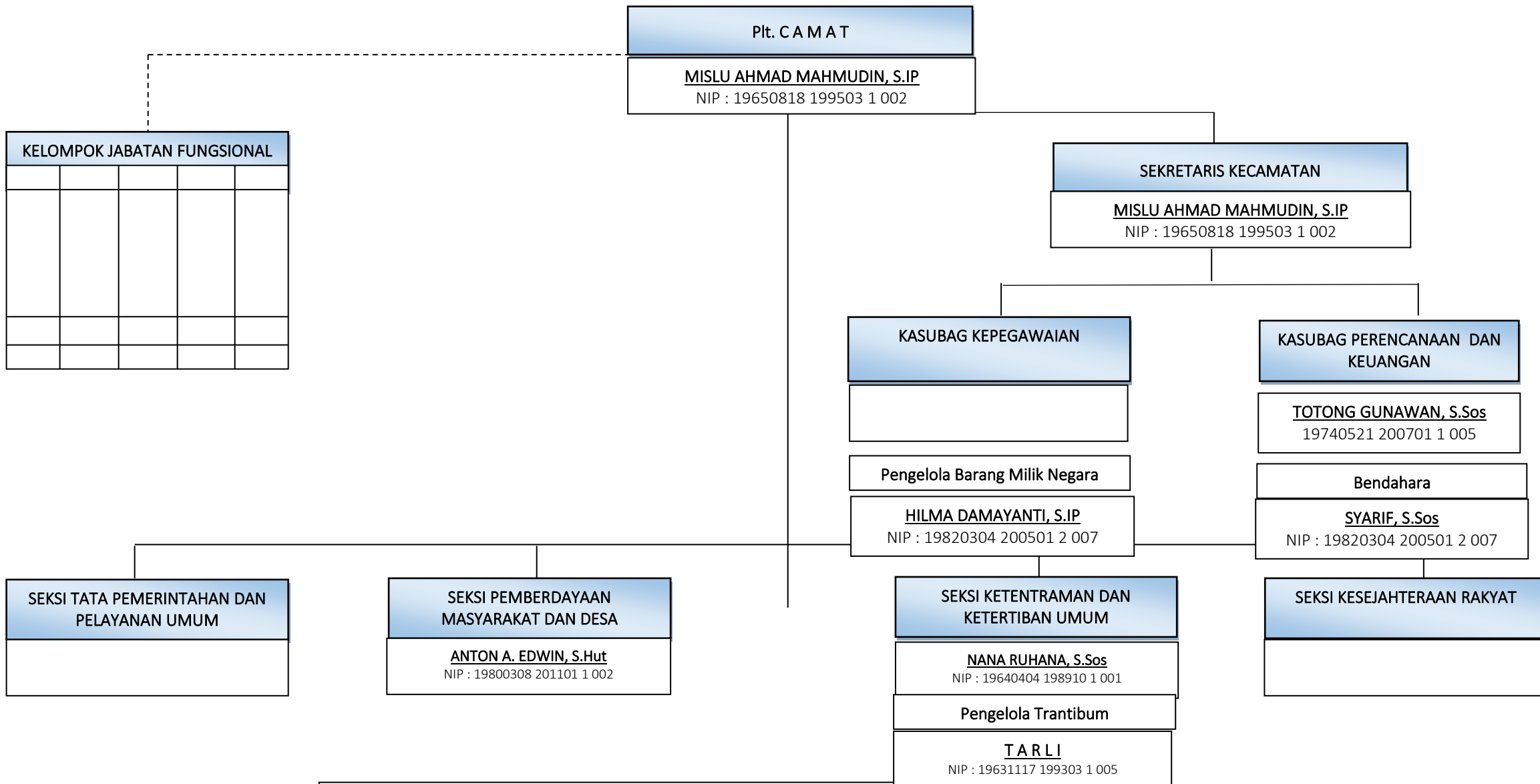
Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cikalong berdasarkan Perbup Nomor 39 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA

Berdasarkan : Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 101 Tahun 2019



2.2 Sumber Daya Kec. Cikalong

11. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kec. Cikalong berjumlah 21 orang, terdiri dari 7 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini.

Kondisi SDM Kecamatan Cikalong

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	6
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	1
		c. SMA/Sederajat	-
		d. Diploma	-
		e. S1	6
		f. S2	-
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	5
		d. IV	1
4.	Status Pegawai	a. ASN	7
		b. Non ASN	14
5.	Jabatan	a. Struktural	4
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

12. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan

aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Cikalong Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	300M ²
		Gedung	3 Unit
		Rumah Dinas	1 Unit
2	Kendaraan Operasional · Roda Empat · Roda Dua	3 Unit 6 Unit	Baik 6 unit baik
3	Komputer	2 Buah	Rusak
4	Laptop	2 Buah	Baik
5	Meja	14 Buah	Baik
6	Kursi Citos	25 Buah	Baik
7	Lemari	1 Unit Kayu	Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-
11	Printer	3 Buah	baik,
12	Kursi tamu	2 Set	Baik
13	Kursi kayu	-	
14	TV dan Meja TV	1 Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	3 Buah	Baik
16	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	1 Unit	Baik
19	Infocus	1 Buah	Baik
20	Sound System	1 Unit	baik
21	CCTV	1 Set	Rusak

B. Kinerja Pelayanan Kec. Cikalong

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Cikalong Kinerja Pelayanan di Kec. Cikalong dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananb Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidangkerja di Kec. Cikalong dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel. 2.3.
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG
 KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 - 2026**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				78,50	78,72	78,75	78,75	78,76	78,50	78,72	78,75	78,75	78,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabel. 2.4.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN
 TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2020**

URAIAN					ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21				
4 01 19 01 00	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN					1.111.318.586	1.450.355.000	1.428.853.000	1.319.499.000		1.102.549.072	1.349.778.003	1.238.938.981	1.211.423.856		99,2	93,07	86,71	91,81		
4 01 19 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																				
4 01 19 1 02	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan					6.584.000	6.584.000	7.440.000	7.440.000		6.393.668	6.468.080	6.547.562	7.440.000		97,1	98,24	88,00	100,00		
4 01 19 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor					13.000.000	13.000.000	14.489.900	14.501.800		13.000.000	13.000.000	14.489.900	14.501.800		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					8.950.000	8.950.000	6.694.100	6.682.200		8.950.000	8.950.000	6.694.100	6.682.200		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 1 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor					7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000		7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman					6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000		6.152.000	6.152.000	6.152.000	6.152.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 1 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor					12.240.000	12.240.000	12.240.000	12.240.000		12.240.000	12.240.000	12.240.000	12.240.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 1 29	Rapat-rapat Koordinasi dan					20.950.000	20.950.000	20.950.000	20.950.000		20.950.000	20.950.000	20.950.000	20.950.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																				
4 01 19 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					25.000.000	22.000.000	-	-		25.000.000	22.000.000	0	0		100,0	100,00	-	-		
4 01 19 02 22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor					7.700.000	7.700.000	7.610.000	7.610.000		7.700.000	7.700.000	7.610.000	7.610.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					86.096.000	86.096.000	86.096.000	86.542.000		86.096.000	86.096.000	86.096.000	86.542.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		100,0	100,00	100,00	100,00		
4 01 19 02 42	Rehabilitasi sedang/Gedung Kantor					0	200.000.000	-	-		-	189.948.000	-	-		-	94,97	-	-		
4 01 19 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																				
4 01 19 06 26	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat daerah					-	-	-	10.000.000		-	-	-	10.000.000		-	-	-	100,00		
4 01 19 10	PROGRAM PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PENGEVALUASIAN SERTA PELAPORAN																				
4 01 19 10 01	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan					25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.797.200		25.000.000	25.000.000	25.000.000	5.797.200		100,0	100,00	100,00	100,00		

4	01	19	10	02	Evaluasi APBDES		13.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00		13.000.000	6.500.000	6.450.000	6.500.000,00		100,0	100,00	99,23	100,00						
4	01	19	10	04	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik		-	-	-	11.385.000		0	0	0	11.385.000		-	-	-	100,00						
4	01	19	10	06	Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa		0	0	20.000.000	10.000.000		-	-	20.000.000	10.000.000		-	-	100,00	100,00						
4	01	19	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR																					
4	01	19	20	01	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa		13.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		13.000.000	6.500.000	6.442.500	6.500.000		100,0	100,00	99,12	100,00						
4	01	19	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
4	01	19	21	31	Penyelenggaraan Musrenbang		19.500.000	6.500.000	6.500.000	6.554.000		19.375.000	6.500.000	6.500.000	6.554.000		99,4	100,00	100,00	100,00						
4	01	19	54		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN																					
4	01	19	54	02	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan		40.000.000	20.000.000	21.000.000	26.000.000		40.000.000	20.000.000	20.950.000	26.000.000		100,0	100,00	99,76	100,00						
4	01	19	54	07	Penguatan Peran majlis Taklim Dalam Mendukung Program Pemerintah		100.000.000	50.000.000	50.000.000	49.500.000		100.000.000	50.000.000	50.000.000	49.500.000		100,0	100,00	100,00	100,00						
4	01	19	78		PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN																					
4	01	19	78	12	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan		44.950.000	44.950.000	44.950.000	44.950.000		44.950.000	44.950.000	44.950.000	44.950.000		100,0	100,00	100,00	100,00						
4	01	19	90		PROGRAM PELAKSANAAN AGENDA NASIONAL/DAERAH																					
4	01	19	90	01	Peringatan hari Besar Nasional		60.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000		60.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000		100,0	100,00	100,00	100,00						
					JUMLAH	1.737.441.899	1.626.940.586	2.036.977.000	1.813.475.000	1.696.303.200	1.605.213.293	1.617.855.740	1.926.232.083	1.622.513.073	1.588.228.056	92,4	99,44	94,56	89,47	93,63						

Berdasarkan Tabel T-C.23 kita dapat melihat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong adalah 78,50 yang berarti masuk dalam mutu pelayanan B dengan predikat baik dan ditahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,22 dengan predikat baik, ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,03 dan ditahun 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya dan di tahun 2020 sebesar 78,76 dengan predikat masih baik.

Dan berdasarkan tabel T-C 24 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata diatas 90 %, setiap tahun anggaran yang tidak terealisasi 100% adalah dari Pos Gaji dan Tunjangan atau Belanja Tidak Langsung, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang biasanya tidak terealisasi 100% adalah dari Belanja Listrik dan di tahun 2018 ada Belanja Modal yang tidak terealisasi 100% yaitu hanya sebesar 94,97% dikarenakan aturan dari pihak Kabupaten, dan secara keseluruhan capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong dari tahun 2016-2021 sudah bisa dikategorikan tinggi atau terealisasi dengan baik.

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kec. Cikalong untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Cikalong selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah

Daerah,

Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kec. Cikalong mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kec. Cikalong untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Cikalong dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kec. Cikalong di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Cikalong

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Cikalong selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Cikalong 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut

peran Kecamatan Cikalong harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan polatindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kec. Cikalong, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kec. Cikalong dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Cikalong, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kec. Cikalong.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Cikalong

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Cikalong selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kec. Cikalong, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kec. Cikalong digambarkan sebagai berikut :

Tabel TB.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurang Optimalnya Pelayanan Masyarakat	Sarana Prasarana Pelayanan yang kurang memadai	Kurangnya pendanaan/Anggaran untuk sarana /pelayanan Publik
2.	Belum Optimalnya kinerja Sumberdaya Aparatur Kecamatan	Kurangnya Kualitas SDM Kecamatan	Kurangnya kemauan untuk bekerja/malas
3.	Kurang Optimalnya Kerjasama/koordinasi Lintas Sektor	Kurangnya Komunikasi antar Lembaga	Kurang fahamnya dari masing2 lembaga akan pentingnya komunikasi anatar lembaga
4.	Lemahnya pembinaan/koordinasi dengan Desa	Kurangnya komunikasi antara Kecamatan dan Desa	Peran Kecamatan yang tidak dianggap terlalu penting oleh Desa

Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kec. Cikalong dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
- b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecam

- b. tan.
- c. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- d. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
- e. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kec. Cikalong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tabel 3.1.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan; b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kec. Cikalong belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang. 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kec. Cikalong. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa. 	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

		<ul style="list-style-type: none"> g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan; h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 			
--	--	---	--	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Ditambahkan dengan program unggulan yang terkait dengan kecamatan Cikalong Tiada hari tanpa pelayanan Dsb...

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kab. Tasikmalaya 2021-2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kec. Cikalong harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kec. Cikalong berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

3.6 Sekretariat Kecamatan

- 3.6.1 Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
- 3.6.2 Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
- 3.6.3 Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

3.7 Seksi Tata Pemerintahan

3.7.1 Fasilitasi program dan kegiatan Desa.

3.7.2 Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3.8 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.

3.9 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

3.9.1 Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

3.9.2 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.

3.9.3 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.

3.10 Seksi Kesejahteraan Sosial

3.10.1 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.

Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondokpesantren yang ada.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
Periode : 2021-2026**

No	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan	58	58	62	66	70	71
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel TC.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, sarana Prasarana dan Manjemen Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas SDM, Pemenuhan Kebutuhan sarana Prasarana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Cikalong guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program

merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Cikalong. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kec. Cikalong tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Cikalong sebagaimana tertuang dalam table berikut.

Tabel T.C 27

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE : 2021 – 2026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE : 2021 -
2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Lokasi	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan													PD Kecamatan CIKALONG	
			7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen													
			7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	20.000.000		
			7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	-	-	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
			7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan													
			7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	bulan	12	1.281.065.639	12	1.342.186.068	12	1.400.000.000	12	1.400.500.000	12	1.401.000.000	12	1.401.500.000
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	Orang												
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/	Orang	-	-	-	-	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000
			7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum													
			7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.501.800	12	32.520.000	12	33.000.000	12	33.500.000	12	34.000.000	12	34.500.000
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	-	-	-	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000

			7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	6.974.200	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	
			7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	box	250	6.000.000	250	6.250.000	250	7.000.000	250	7.500.000	250	8.000.000	250	8.500.000	
			7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Bulan	12	20.950.000	12	20.950.000	12	21.000.000	12	21.500.000	12	22.000.000	12	22.500.000	

				7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor														
				7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	-	-	-	-	2	50.000.000	-	-	-	-	-		
				7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	-	-	-	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
				7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
				7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12	7.440.000	12	11.976.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.500.000	
				7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa cleaning service	Bulan	-	-	-	-	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
									Terlaksananya Jasa tenaga pengamanan	Bulan	4	12.000.000	4	21.600.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000
									tersedianya tenaga pengemudi	bulan	-	-	-	-	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00
									tersedianya tenaga administrasi	bulan	-	-	-	-	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00
				7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah														
				7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Unit	9	86.542.000	9	86.992.000	9	87.000.000	9	87.500.000	9	88.000.000	9	88.500.000	
									Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak	Unit	-	-	-	-	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000	9	5.000.000		
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	bulan	-	-	-	-	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	
									Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tepat bayar pajak	bulan	-	-	-	-	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	bulan	-	-	-	-	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
				7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	tahun	1	14.110.000	1	14.500.000	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	
				7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan														
				7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen													
				7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Berita acara rekonsiliasi	Dokumen	36	25.000.000	36	35.000.000	36	35.500.000	36	36.000.000	36	36.500.000	36	37.000.000	
				7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	Dokumen	12	10.108.000	12	20.000.000	12	20.500.000	12	21.000.000	12	21.500.000	12	22.000.000	
Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan																						PD Kecamatan CIKALONG	

			7	01	002	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan															
			7	01	002	2.02	002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000	
			7	01	002	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan															
			7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	Dokumen	13	44.950.000	13	44.950.000	13	45.000.000	13	45.500.000	13	46.000.000	13	46.500.000	
			7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan															
			7	01	003	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah desa terkait monev dan pembinaan	Desa														
			7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Monev bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	13	13.000.000	13	13.000.000	13	13.000.000	13	13.000.000	
																						PD Kecamatan CIKALONG	
			7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti															
			7	01	004	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Bulan														
			7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Bulan	-	-	12	33.400.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	
			7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	4	75.500.000	4	75.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	PD Kecamatan CIKALONG
			7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum															
			7	01	005	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															

					7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000					
					7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Mewujudkan Stabilitas Kesamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	kali	-	-	-	-	5	78.000.000	5	78.500.000	5	79.000.000	5	79.500.000	5	79.500.000					
					7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	kali	-	-	-	-	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0	12	8.400.000,0					
					7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan																				
					7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan																				
					7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan dan Perubahan APBDES	Dokumen			0		0			0			0			0					
					7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Tertibnya Administrasi Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Pemerintah Desa	Dokumen			0		0			0			0			0					
					7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	13	13.000.000	13	29.900.000	13	30.000.000	13	30.500.000	13	31.000.000	13	31.500.000	13	31.500.000					
					7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	fasilitasi Tugas dan Fungsi BPD	Desa		0		0		0		0		0		0		0					
					7	01	006	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas ,fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Peran dan fungsi LKD dimasing-masing desa	Desa		0		0		0		0		0		0		0					
					7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa	1	13.000.000	1	25.000.000	-	-		-		-		-		-					
					7	01	006	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dama Upaya meningkatkan gotong royong ,partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat	Desa		0		0		0		0		0		0		0					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kec. Cikalong. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR
		PERIODE RPJMD TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERIODE RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Cikalong								
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan		58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		79.90	80.50	80.50	81.20	81.55	81.95	81.95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Cikalong selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Tasikmalaya yaitu “ **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera** ”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Cikalong, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Cikalong berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Cikalong berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kec. Cikalong Tahun 2021-2026 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya.

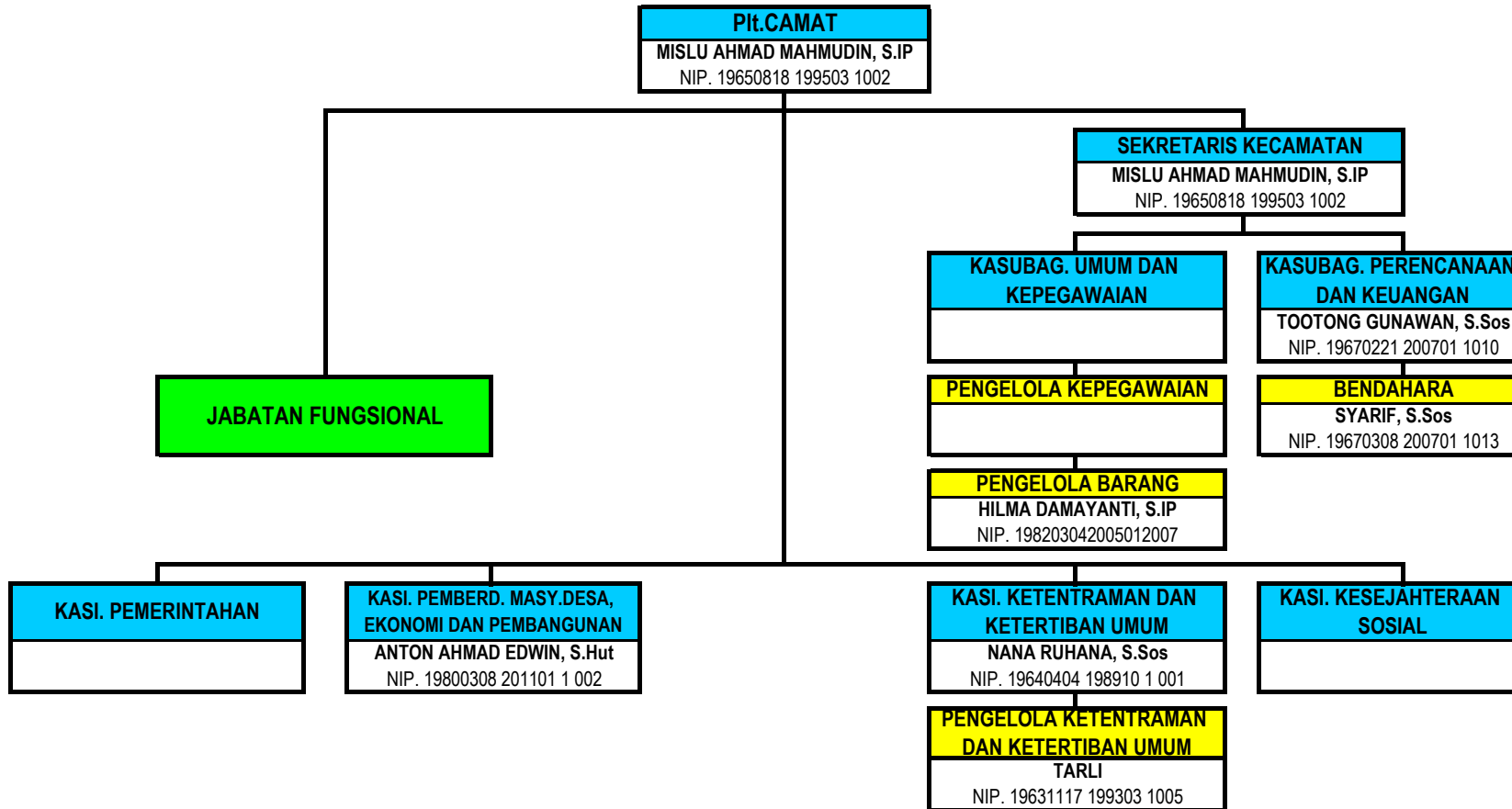
Plt. CAMAT CIKALONG,



MISLU AHMAD MAHMUDIN, S.IP
Pembina

NIP. 19650818 199503 1 002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN CIKALONG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021**



Tabel. 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				79.90	78.72	78.75	78.75	78.76	79.90	78.72	78.75	78.75	78.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

RATA BUHAN
Realisasi
21
5.000.000
5.000.000
5.000.000
37.834.406
-
3.076.000
-
2.201.600
1.200.000
720.000
-
760.000
-
12.000.000

1,384,000
-
-
5,000,000
1,082,400
-
1,100,000
1,000,000
-
1,000,000
-
840,000
-
-
-
-
-
-

4	01	19	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR																	
4	01	19	20	01	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa		13,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000		13,000,000	6,500,000	6,442,500	6,500,000		100.0	100.00	99.12	100.00		
4	01	19	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
4	01	19	21	31	Penyelenggaraan Musrenbang		19,500,000	6,500,000	6,500,000	6,554,000		19,375,000	6,500,000	6,500,000	6,554,000		99.4	100.00	100.00	100.00		
4	01	19	54		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN																	
4	01	19	54	02	Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan		40,000,000	20,000,000	21,000,000	26,000,000		40,000,000	20,000,000	20,950,000	26,000,000		100.0	100.00	99.76	100.00		
4	01	19	54	07	Penguatan Peran majlis Taklim Dalam Mendukung Program Pemerintah		100,000,000	50,000,000	50,000,000	49,500,000		100,000,000	50,000,000	50,000,000	49,500,000		100.0	100.00	100.00	100.00		
4	01	19	78		PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN																	
4	01	19	78	12	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan		44,950,000	44,950,000	44,950,000	44,950,000		44,950,000	44,950,000	44,950,000	44,950,000		100.0	100.00	100.00	100.00		
4	01	19	90		PROGRAM PELAKSANAAN AGENDA NASIONAL/DAERAH																	
4	01	19	90	01	Peringatan hari Besar Nasional		60,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000		60,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000		100.0	100.00	100.00	100.00		
					JUMLAH		1,737,441,899	1,626,940,586	2,036,977,000	1,813,475,000	1,696,303,200	1,605,213,293	1,617,855,740	1,926,232,083	1,622,513,073	1,588,228,056	92.4	99.44	94.56	89.47	93.63	

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90	80.50	80.85	81.20	81.55	81.95

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

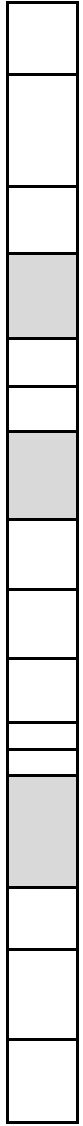
VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananb Publik 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

							Perizinan Perizinan Usaha Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tepat bayar pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000		
			7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	1 Tahun	13,397,000	1 Tahun	13,397,000	1 Tahun	14,000,000	1 Tahun	14,500,000	1 Tahun	15,000,000		
	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan												
			7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Benita acara rekonsiliasi	36 Kali	25,000,000	36 Kali	25,000,000	36 Kali	25,500,000	36 Kali	26,000,000	36 Kali	26,500,000	36 Kali	27,000,000
			7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	12 Kali	10,000,000	12 Kali	10,000,000	12 Kali	10,500,000	12 Kali	11,000,000	12 Kali	11,500,000	12 Kali	12,000,000
			7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan												
			7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,500,000	1 Dokumen	16,000,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	17,000,000
			7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan												
			7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	40,700,000	10 Dokumen	40,700,000	10 Dokumen	41,000,000	10 Dokumen	41,500,000	10 Dokumen	42,000,000	10 Dokumen	42,500,000

			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	2 PHBN, 12 kali pembinaan	25,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	25,000,000	-	-	-	-	-	-	
			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	-	-	2 PHBN, 12 kali pembinaan	27,500,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	28,000,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	28,500,000	2 PHBN, 12 kali pembinaan	29,000,000	
			7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	-	-	5 Kali	78,000,000	5 Kali	78,500,000	5 Kali	79,000,000	5 Kali	79,500,000	
			7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	-	-	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	
			7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan											
			7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan											
			7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Kali	10,000,000	10 Kali	10,000,000	10 Kali	10,500,000	10 Kali	11,000,000	10 Kali	11,500,000	
			7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	10,000,000	1 Dokumen Musrenbang Kecamatan	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-

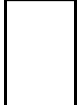
Lokasi

PD
Kecamatan
CIKALONG

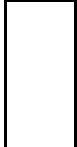


PD Kecamatan CIKALONG

PD
Kecamatan
CIKALONG



PD
Kecamatan
CIKALONG



PD
Kecamatan
CIKALONG



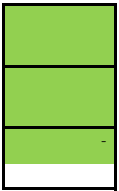
PD Kecamatan CIKALONG

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan					Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Lok	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan													PD Kecamatan CIKALONG	
			7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen													
			7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1	19,500,000	1	19,500,000	1	19,500,000	1	20,000,000			
			7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	-	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		
			7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000		
			7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang														
			7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	bulan	12	1,281,065,639	12	1,342,186,068	12	1,400,000,000	12	1,400,500,000	12	1,401,000,000	12	1,401,500,000	
								Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	Orang													
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/	Orang	-	-	-	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000		
			7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum														
			7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20,501,800	12	32,520,000	12	33,000,000	12	33,500,000	12	34,000,000	12	34,500,000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	-	-	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		
			7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	6,974,200	12	6,000,000	12	6,500,000	12	7,000,000	12	7,500,000	12	8,000,000	

				7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	box	250	6,000,000	250	6,250,000	250	7,000,000	250	7,500,000	250	8,000,000	250	8,500,000		
				7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Bulan	12	20,950,000	12	20,950,000	12	21,000,000	12	21,500,000	12	22,000,000	12	22,500,000		
				7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor															
				7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	-	-	-	-	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	-	-	-	-	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000		
				7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	12	7,440,000	12	11,976,000	12	12,000,000	12	12,500,000	12	13,000,000	12	13,500,000		
				7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertaksanya Jasa cleaning service	Bulan	-	-	-	-	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00		
									Tertaksanya Jasa tenaga pengamanan	Bulan	4	12,000,000	4	21,600,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	4	24,000,000	
									tersedianya tenaga pengemudi	bulan	-	-	-	-	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	
									tersedianya tenaga administrasi	bulan	-	-	-	-	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	12,000,000.00	
				7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah															
				7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Unit	9	86,542,000	9	86,992,000	9	87,000,000	9	87,500,000	9	88,000,000	9	88,500,000		
									Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak	Unit			-	-	-	9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000	9	5,000,000		
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	bulan	-	-	-	-	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00		
									Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tepat bayar pajak	bulan	-	-	-	-	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	bulan	-	-	-	-	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000		
				7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung atau bangunan	tahun	1	14,110,000	1	14,500,000	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	16,500,000		





--	--	--	--	--	--	--

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan													
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen											
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Berita acara rekonsiliasi	3 Dokumen		36 Kali	25,000,000	36 Kali	35,000,000	36 Kali	35,500,000	36 Kali	36,000,000	36 Kali	
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	1 Dokumen		12 Kali	10,108,000	12 Kali	20,000,000	12 Kali	20,500,000	12 Kali	21,000,000	12 Kali	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Kecamatan												
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tingkat Kecamatan			1 Doku men	15,000,000	1 Doku men	15,000,000	1 Doku men	15,500,000	1 Doku men	16,000,000	1 Doku men	
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan												
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelayanan Perizinan Non Usaha di Tingkat Kecamatan			13 Dokum en	44,950,000	10 Doku men	44,950,000	10 Doku men	45,000,000	10 Doku men	45,500,000	10 Doku men	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan												
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah desa terkait movev dan pembinaan	Desa											
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Movev bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti												
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Bulan											
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Bulan		-	-	-	33,400,000.00	-	-	-	-	-	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan		5 Kali	75,500,000	5 Kali	75,500,000	-	-	-	-	-	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum												
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan		4 Kali	25,000,000	4 Kali	25,000,000	-	-	-	-	-	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan		-	-	4 Kali	9,500,000.00	4 kali	9,500,000	4 Kali	10,000,000	4 Kali	
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Kegiatan		-	-	4 Kali	35,000,000.00	4 Kali	35,500,000	4 Kali	36,000,000	4 Kali	
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Forkopimcam yang dilaksanakan	Kegiatan		-	-	-	-	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen											
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Persen											
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan dan Perubahan APBDES	26 Dokumen				26 Dokum en	11,000,000	26 Dokum en	11,500,000	26 Dokum en	12,000,000	26 Dokum en	
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Tertibnya Administrasi Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Pemerintah Desa	2 Dokumen				-	10,500,000	13 Kali	11,000,000	13 Kali	11,500,000	13 Kali	
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Desa		13 Kali	13,000,000	13 Kali	29,900,000	13 Kali	30,000,000	13 Kali	30,500,000	13 Kali	
7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	fasilitasi Tugas dan Fungsi BPD	13 Desa				-	13 Kali	7,500,000	13 Kali	8,000,000	13 Kali	8,500,000	13 Kali
7	01	006	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas ,fungsi dan kewajiban Lembaga Masyarakat	Meningkatnya Peran dan fungsi LKD dimasing-masing desa	13 Desa				-	13 Kali	24,500,000	13 Kali	25,000,000	13 Kali	25,500,000	13 Kali
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partifipatif	13 Desa		1 Dokum en Musren bang Kecamatan	13,000,000	1 Dokum en Musren bang Kecamatan	25,000,000	-	-	-	-	-	

7	01	006	2.01	016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dama Upaya meningkatkan gotong royong ,partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat desa	13 Desa				-	13 Kali	10,500,000	13 Kali	11,000,000	13 Kali	11,500,000	13 Kali
---	----	-----	------	-----	--	---	---------	--	--	--	---	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI					KETERANGAN
TAHUN 2025	TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026		
Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
38	39	40	41	42	43

					PD Kecamatan Cicalong
5,000,000	4 Bulan	5,000,000	4 Bulan	5,000,000	
5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	
50,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	
1,401,000,000	12 Bulan	1,401,500,000	12 Bulan	1,402,000,000	
-	-	-	-	-	
34,000,000	12 Bulan	34,500,000	12 Bulan	35,000,000	
-	-	-	-	-	
7,500,000	12 Bulan	8,000,000	12 Bulan	8,500,000	
8,000,000	12 Bulan, 250 jamuan makan	8,500,000	12 Bulan, 250 jamuan makan	9,000,000	
22,000,000	12 Bulan	22,500,000	12 Bulan	23,000,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
13,000,000	12 Bulan	13,500,000	12 Bulan	14,000,000	
45,000,000	12 Orang/bulan	45,000,000	12 Orang/bulan	45,000,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
88,000,000	9 Unit/Tahun	88,500,000	9 Unit/Tahun	89,000,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	
16,000,000	1 Tahun	16,500,000	1 Tahun	17,000,000	

					PD Kecamatan Cikalong
36,500,000	36 Kali	37,000,000	36 Kali	37,500,000	
21,500,000	12 Kali	22,000,000	12 Kali	22,500,000	
16,500,000	1 Dokumen	17,000,000	1 Dokumen	17,500,000	
46,000,000	10 Dokumen	46,500,000	10 Dokumen	47,000,000	
					PD Kecamatan Cikalong
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
					PD Kecamatan Cikalong
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
					PD Kecamatan Cikalong
-	-	-	-	-	
10,500,000	4 Kali	11,000,000	4 Kali	11,500,000	
36,500,000	4 Kali	37,000,000	4 Kali	37,500,000	
8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	12 Bulan	8,400,000.0	
					PD Kecamatan Cikalong
12,500,000	26 Dokumen	13,000,000	26 Dokumen	13,500,000	
12,000,000	13 Kali	12,500,000	13 Kali	13,000,000	
31,000,000	13 Kali	31,500,000	13 Kali	32,000,000	
9,000,000	13 Kali	9,500,000	13 Kali	10,000,000	
26,000,000	13 Kali	26,500,000	13 Kali	27,000,000	
-	-	-	-	-	

12,000,000	13 Kali	12,500,000	13 Kali	13,000,000	
------------	---------	------------	---------	------------	--

CASCADING RENSTRA KECAMATAN TAHUN 2021 - 2026

Dengan Semangat Gotong Royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius, Saing, dan Sejahtera

Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Unit

SASARAN 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan

2021	2022	2023	2024	2025	2026

SASARAN 2

Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

2021	2022	2023	2024	2025	2026

PROGRAM

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan

No	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LUMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

VISI KABUPATEN

MISI 2 KABUPATEN

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

TUJUAN KECAMATAN

SASARAN KECAMATAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
26	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag P&K
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag P&K
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pemerintahan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pemerintahan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kasi Pemerintahan
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pemerintahan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PMDEP
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Trantib
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Kesos
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

PHNB

PHBI
BPNT dan PKH

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026	KETERANGAN
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2026					
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
7	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	point		1,455,633,639		1,566,374,068		1,886,000,000		1,889,500,000		1,993,000,000		1,997,000,000		10,787,507,707	PD Kecamatan Cikalong		
7	01	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		-		-	8	74,500,000		8	74,500,000		8	75,000,000		32	298,500,000		
7	01	01.2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0		6	39,500,000		6	39,500,000		6	40,000,000		24	158,500,000	
7	01	01.2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				2	35,000,000		2	35,000,000		2	35,000,000		8	140,000,000		
7	01	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	100	1,281,065,639	100	1,342,186,068	100	1,400,000,000	100	1,450,000,000	100	1,500,000,000	100	1,550,000,000	100	8,523,251,707		
7	01	01.2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	10	1,281,065,639	15	1,342,186,068	15	1,400,000,000	15	1,450,000,000	15	1,500,000,000	15	1,550,000,000	85	8,523,251,707	
7	01	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	%	100	100	54,426,000	100	65,720,000	100	72,500,000	100	74,500,000	100	76,500,000	100	78,500,000	100	422,146,000		
7	01	01.2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan-perundang-undangan	Orang	NA				8	20,000,000	8	20,000,000	8	20,000,000	8	20,000,000	32	80,000,000		
7	01	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	100	20,501,800	100	32,520,000	100	33,000,000	100	33,500,000	100	34,000,000	100	34,500,000	100	188,021,800		
7	01	01.2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	20,501,800	5	32,520,000	5	33,000,000	5	33,500,000	5	34,000,000	5	34,500,000	30	188,021,800	
7	01	01.2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	1	6,974,200	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000	1	7,500,000	1	8,000,000	6	41,974,200	
7	01	01.2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan tamu	Laporan	12	12	6,000,000	12	6,250,000	12	7,000,000	12	7,500,000	12	8,000,000	12	8,500,000	72	43,250,000	
7	01	01.2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	20,950,000	12	20,950,000	12	21,000,000	12	21,500,000	12	22,000,000	12	22,500,000	72	128,900,000	
7	01	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	100	100	19,490,000	100	56,976,000	100	72,000,000	100	72,500,000	100	73,000,000	100	73,500,000	100	367,466,000		
7	01	01.2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit					2	50,000,000				2	50,000,000		2	100,000,000		
7	01	01.2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					2	30,000,000		2	30,000,000		2	30,000,000		8	120,000,000	
7	01	01.2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air Listrik yang disediakan	Laporan	12		7,440,000	12	11,976,000	12	12,000,000	12	12,500,000	12	13,000,000	12	13,500,000	72	70,416,000	
7	01	01.2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12		12,050,000	12	46,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	72	297,050,000	
7	01	01.2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100,652,000	100	101,492,000	100	167,000,000	100	168,000,000	100	169,000,000	100	170,000,000	100	876,144,000	
7	01	01.2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	8	86,542,000	8	86,992,000	8	132,000,000	8	132,500,000	8	133,000,000	8	133,500,000	48	704,534,000	
7	01	01.2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2				2	10,000,000		2	10,000,000		2	10,000,000		8	40,000,000	
7	01	01.2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	7				7	10,000,000		7	10,000,000		7	10,000,000		28	40,000,000	
7	01	01.2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2	2	14,110,000	2	14,500,000	2	15,000,000	2	15,500,000	2	16,000,000	2	16,500,000	12	91,610,000	
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan	point		95,058,000		114,950,000		116,500,000		118,500,000		120,500,000		122,500,000		688,008,000	PD Kecamatan Cikalong		
7	01	02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		13	35,108,000	13	55,000,000	13	56,000,000	13	57,000,000	13	58,000,000	13	59,000,000	78	320,108,000		
7	01	02.2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12		25,000,000	12	35,000,000	12	35,500,000	12	36,000,000	12	36,500,000	12	37,000,000	72	205,000,000	
7	01	02.2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	10,108,000	1	20,000,000	1	20,500,000	1	21,000,000	1	21,500,000	1	22,000,000	6	115,108,000	
7	01	02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	16,500,000	1	17,000,000	6	95,000,000		
7	01	02.2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Laporan		1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	16,500,000	1	17,000,000	6	95,000,000	
7	01	02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	urusan		1	44,950,000	1	44,950,000	1	45,000,000	1	45,500,000	1	46,000,000	1	46,500,000	1	272,900,000		
7	01	02.2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan	Dokumen		1	44,950,000	1	44,950,000	1	45,000,000	1	45,500,000	1	46,000,000	1	46,500,000	6	272,900,000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%						13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		52,000,000			
7	01	03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa							13,000,000		13,000,000		13,000,000		13,000,000		52,000,000			

